

ISLAMISME: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

Siti Mahmudah
Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia
sitimahmudah@radenintan.ac.id

Abstract. *This study examines the origin, existence, and development of Islamism group in Indonesia since pre-independence until now. Islamism is a group of Muslims who are obedient to the teachings of Islam, but they are very extreme, literal, static and rigid in understanding the teachings of Islam (Alquran), and reject to the other Muslims who disagree with Islamic ideology that they have embraced. The group of Islamism existed and emerged in Indonesia, it was not apart from the influence of the spread of Islamic teachings from al-Ikhwan al-Muslimun that was founded by Hasan al-Banna in Egypt in 1928. The group of Islamism was the first Muslim group before the other Muslim groups in Indonesia; such as the Pos-Islamism group, the Liberal Islam Group, the Moderate Islamic Group, the Progressive Islam Group. The group of Islamism in Indonesia—as al-Ikhwan al-Muslimun in Egypt who aspires to spread the ideology of Islam for all of the world—seeks to spread their ideology with the movement of "creeping up" for all of the area in Indonesian, since before independence until now. Islamist groups succeeded in spreading Islam and Sharia through mosques, schools, ta'lim majlis. The existence and development of Islamist groups in Indonesia today are flattered. They have very much support from the political elite. However, they are not aware that their hands are being borrowed or exploited by political elites to seize or get the power in irrational ways.*

Keywords: *Islamism, Emergence, Existence, Development, Indonesia.*

Abstrak. *Studi ini membahas tentang asal usul, eksistensi dan perkembangan kelompok Islamisme di Indonesia sejak pra-kemerdekaan sampai sekarang. Kelompok Islamisme adalah kumpulan Muslim yang patuh terhadap ajaran Islam, namun mereka sangat ekstrem, literal, statis dan kaku dalam memahami ajaran Islam (Alquran), serta menolak golongan Muslim lain yang berbeda dengan faham Islam yang sudah mereka anut. Kelompok Islamisme ada dan muncul di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh penyebaran ajaran Islam ala al-Ikhwan al-Muslimun yang didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir pada tahun 1928. Kelompok Islamisme merupakan kelompok Muslim yang pertama ada sebelum adanya kelompok-kelompok Muslim lain di Indonesia; seperti kelompok Pos-Islamisme, Kelompok Islam Liberal, Kelompok Islam Moderat, Kelompok Islam Progresif. Kelompok Islamisme di Indonesia –sebagaimana al-Ikhwan al-Muslimun di Mesir yang bercita-cita menyebarkan faham berislam ke seluruh dunia—berupaya menyebarkan paham Islamisme dengan gerakan "merayap" ke seluruh bumi Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang. Kelompok Islamisme berhasil menyebarkan faham Islam dan Syariah melalui, antara lain: masjid-masjid, sekolah-sekolah, majelis-majelis taklim. Eksistensi dan perkembangan kelompok-kelompok Islamisme di Indonesia zaman ini sedang merasa tersanjung, karena banyak mendapat dukungan dari para elit politik. Namun sebaliknya, mereka tidak sadar bahwa tangan-tangan mereka sedang dipinjam atau pun dimanfaatkan oleh para elit politik untuk merebut atau pun mendapatkan sebuah kekuasaan dengan cara-cara yang tidak rasional.*

Kata Kunci: *Islamisme, Eksistensi, Kemunculan, Perkembangan, Indonesia.*

Pendahuluan

Islamisme adalah pemahaman agama (Islam) dalam bentuk tatanan sebuah negara, yaitu negara Islam. Kelompok Islamisme telah mengidolakan Islam pada zaman Nabi saw. di Madinah, dan mereka berupaya untuk mengembalikan praktik berislam pada zaman sekarang untuk kembali seperti praktik berislam pada zaman Nabi saw., yaitu zaman empat belas abad yang silam. Agenda utama Islamisme adalah mendirikan tatanan negara Islam dan memobilisasi umat Islam dalam rangka membangun tatanan yang totaliter yang disebut sebagai nizam Islami.¹ Islam mendukung Islam sebagai suatu gerakan yang ingin mengembalikan Islam seperti yang telah dipraktikkan oleh Nabi saw. di Madinah. Inilah ide utama dibentuknya gerakan Islamisme. Alasannya bahwa praktik Islam yang dianggapnya benar, tidak salah, tidak bisa ditawar, tidak bisa diubah, bisa menyelamatkan, tidak ada unsur Barat, betul-betul dari Tuhan dan tidak dipengaruhi oleh pemikiran manusia. Menurut Islamisme hanyalah model praktik berislam pada zaman Nabi saw. selainnya adalah praktik berislam yang ditolak alias *bid'ah*.

Islam zaman Nabi saw. di Madinah yang telah diidolakan oleh kelompok Islamisme, menurut penulis, hanya dapat dipraktikkan dan terpraktikkan pada zaman Nabi saw. sampai wafatnya. Setelah zaman Nabi saw. berakhir dan digantikan oleh *al-Khulafa' al-Rasyidin*, sistem pemerintahan yang persis pada zaman Nabi saw. sudah tidak bisa dipraktikkan lagi. Alasannya, Nabi Muhammad saw. menjalankan pemerintahannya di Madinah dalam bimbingan wahyu Allah, sedangkan para *al-Khulafa' al-Rasyidin*

mesti berjihad sendiri terhadap setiap masalah yang datang dan baru, belum pernah ada pada zaman Nabi Muhammad saw. Jadi sudah sangat jelas bahwa apa yang diwacanakan oleh kelompok Islamisme yang ingin mendirikan negara Islam ala zaman Nabi saw. di Madinah, sangatlah jauh dari jangkauan dan sungguh tidak rasional. Alasan lain bahwa kelompok Islamisme adalah para penganut Islam yang lahir sekitar abad ke-18, jauh sesudah masa Nabi saw. (w. 632 M/ awal abad ke-7) berakhir, dan sangat mustahil bisa mempraktikkan Islam persis seperti di zaman Nabi saw.

Selain dari yang telah disebut di atas, munculnya gerakan Islamisme pada tahun 1928 M, karena adanya tarik menarik dengan relasi kuasa yang ada pada masa itu. Ada sekelompok Muslim di Mesir menolak sistem yang dipraktikkan oleh rezim. Alasannya bahwa rezim tidak menerapkan Syariat Islam sebagai dasar negara dan rezim lebih cenderung pro terhadap hukum Barat. Gerakan Islamisme untuk pertama kalinya ada di Mesir bersamaan dengan munculnya sebuah organisasi Islam, yaitu *al-Ikhwan al-Muslimun* yang didirikan oleh Hasan al-Banna tahun 1928.

Kelompok Islamisme² merupakan kelompok Muslim yang pertama ada di Indonesia, jauh sebelum Pos-Islamisme yang baru muncul sekitar tahun 1970-an. Kelompok Islamisme yang berpandangan bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna dibanding agama lain yang ada (Kristen atau pun Yahudi),³ syariatnya pun murni dari Allah, dan bisa menjadi alternatif untuk menolak praktik kuasa yang menurut mereka, tidak Islami di Indonesia. Wujudnya ada di dalam Partai Masyumi pada masa itu yang

¹ Bassam Tibi, *Islamism and Islam* (Yale University Press), diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: *Islam dan Islamisme* (Bandung: Mizan, 2016), h. 292.

² Kelompok Muslim yang berpegang teguh pada keyakinan bahwa Islam itu murni dan mesti jadi dasar dalam sebuah negara secara formal.

³ Siti Mahmudah, Reformasi Syariat Islam (Kritik Pemikiran Khalil Abdul Karim), dalam *Jurnal al-Adalah*, Vol. 13 No. 1 2016, h. 83.

menginginkan Indonesia Merdeka berdasarkan syariat Islam yang dituangkan dalam sila pertama Pancasila: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan berubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, ditetapkan sebagai sila yang pertama Pancasila, sejak tahun 1945 sampai sekarang.

Kelompok Islamisme di Indonesia, sejak zaman pemerintahan Soekarno sampai sekarang telah menolak sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dan tetap berupaya untuk kembali pada Piagam Jakarta. Alasannya bahwa Piagam Jakarta lebih cocok untuk Indonesia yang nota bene dihuni oleh mayoritas Muslim, yaitu 95 %.⁴

Selanjutnya kelompok Islamisme telah mempertahankan sebuah paham bahwa Islam adalah agama dan negara. Negara tidak mempunyai fungsi lain kecuali untuk mempraktikkan ritus-ritus agama.⁵ Penulis berpendapat bahwa anggapan-anggapan terhadap syariat Islam ini semakin terus diwacanakan yang menimbulkan kesan *represif* dan menyimpang dari hakikat syariat itu sendiri. Negara bersifat nasional sedangkan keberadaan Islam sebagai agama, seperti halnya agama yang lain di Indonesia sama-sama menopang keberadaan sebuah negara untuk bisa saling bekerja sama demi menunjang kesejahteraan masyarakat. Antara agama dan negara tidak saling beradu kekuatan untuk saling menguasai dalam rangka mempertahankan *status quo*.

Wujud dari adanya pertahanan terhadap *status quo* tersebut di atas adalah adanya bentuk-bentuk penolakan dan perlawanan terhadap rezim yang berkuasa

di Indonesia. Penolakan dan perlawanan dimaksud sudah dimulai sejak tahun 1950-an yang dilakukan kelompok Islamisme⁶ dan dipelopori oleh kelompok Masyumi⁷ pada mulanya, terus berlanjut sampai sekarang yang berbuntut pada peristiwa pilkada Jakarta yang telah dimenangkan atas isu agama (Islam dan syariat Islam) yang berkembang dan berhasil menumbangkan lawan politiknya (Ahok-Djarot) dalam Pemilu Gubernur Jakarta, 19 April 2017 lalu.

Permasalahan yang telah dipaparkan tersebut di atas akan dibahas secara lebih rinci dalam sub bab pembahasan dalam penelitian ini. Sebagai fokusnya, penelitian ini akan menjawab permasalahan tentang kemunculan, eksistensi, perkembangan, dan paradigma Islamisme di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan historis kontekstualis dan teori relasi-kuasa. Alasannya bahwa untuk dapat menjawab permasalahan yang telah dipaparkan dalam pendahuluan tersebut di atas sangat membutuhkan analisa yang sangat mendalam untuk memperoleh jawaban dari apa yang telah dirumuskan dalam pendahuluan *research* ini. Isu-isu yang berbau syara semakin berkembang di Indonesia dan sangat dipengaruhi oleh adanya relasi kuasa: “Di mana ada sebuah kekuasaan pasti ada penolakan”,⁸ wujudnya adalah sebuah gerakan masa dengan memunculkan segala macam isu dalam rangka menolak kuasa yang ada.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Data

⁴ Fuad Zakaria, *Mitos dan Realitas dalam Gerakan Islamisme Kontemporer* (Yogyakarta: LkiS, 2014), h. 113.

⁵ *Ibid.*, h. 112.

⁶ Kelompok Islam yang mendukung Islam sebagai suatu gerakan politik. http://ms.wikipedia.org/wiki/Islam_Militan.

⁷ *Ensiklopedi Islam*, jilid 3 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), h. 228.

⁸ Siti Mahmudah, *Historisitas Syariah: Kritik Relasi Kuasa Khalil Abdul Karim* (Yogyakarta: LkiS, 2016), h. 25.

yang diperoleh dari hasil pemberitaan di media massa, buku-buku dan jurnal-jurnal diolah dan dianalisa berdasarkan metode kualitatif dengan pendekatan historis kontekstualis, dikembangkan dengan imajinasi kreatif dari penulis, dan dibaca berdasarkan teori relasi kuasa Foucault.

Asal-Usul Munculnya Islamisme di Indonesia

Agama dan politik tampak menyatu dalam negara Muslim historis, sejak zaman Nabi saw. di Madinah, karena upaya Nabi saw. menggunakan agama (Islam) dengan bimbingan wahyu untuk merespon persoalan umat pada waktu itu. Penulis berargumen bahwa inilah yang menjadi akar masalah adanya perdebatan panjang yang menimbulkan adanya kesalahpahaman antara Islam dan politik. Persoalan ini telah memunculkan kebingungan dan kesalahpahaman tentang apa Islam yang sebenarnya. Dunia Barat berpaham bahwa Islam adalah agama politik. Kelompok Islamisme berpaham bahwa Islam dan politik itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*din wa daulah*).

Asal usul Islamisme (Islam politik) yang muncul sebagai akibat krisis di dunia Islam dapat ditelusuri sejak lahirnya *al-Ikhwan al-Muslimun*⁹ di Mesir—sebagai pangkalan awal gerakan Islamisme—pada tahun 1928 M. Gerakan ini menyebar ke seluruh dunia Muslim, termasuk Indonesia¹⁰ dalam rangka

dekolonialisasi,¹¹ krisis nasional (kekalahan perang melawan Israel tahun 1967), gejala sosial politik global (bukan gejala keagamaan),¹² *al-hall al-Islam* (solusi Islam); faktor internal: otoriter, korupsi, tidak adil, sosio ekonomi dan politik. Penganjur dan pengikut gerakan ini disebut Islamisme, artinya Muslim yang berkomitmen terhadap aksi politik untuk menerapkan apa yang mereka anggap sebagai agenda Islam.¹³ Gerakan Islamisme ini terbukti muncul secara besar-besaran di Mesir pada tahun 1970-an dan puncaknya ditandai oleh terbunuhnya Presiden Anwar Sadat pada September 1981.¹⁴

Sadat dimusuhi dan ditembak oleh kelompok Islamisme karena dianggap pro-Barat dan memberikan kelonggaran pada Israel dengan penerimaan damai. Perjanjian Perdamaian (*Camp David*) yang ditandatangani pada tanggal 17 September 1978 di Gedung Putih dan diselenggarakan untuk “perdamaian” di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter, memimpin perundingan rahasia yang berlangsung selama 12 hari antara Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin. Perjanjian ini mendapatkan namanya dari tempat peristirahatan milik para Presiden AS, *Camp David*, di Frederick County, Maryland. Perjanjian ini juga melahirkan

⁹ Visi *al-Ikhwan al-Muslimun* adalah tentang negara Islam berbasis syariah sebagai tatanan politik yang menjadi ciri mendasar Islamisme. Lihat Bassam Tibi, *Islamism and Islam*, h. 20.

¹⁰ Sosok Hasan al-Banna adalah tokoh utama yang bisa disebut dan diabadikan dalam hal yang terkait dengan hal Islamisme ini.

¹¹ Ini termasuk faktor eksternal, yaitu kebencian terhadap dominasi Barat dan Israel.

¹² Noorhaidi Hasan dalam bukunya *Islam Politik di Dunia Kontemporer*, mengutip Gilles Kepel, dalam bukunya *Jihad: The Trail of Political Islam*, mendefinisikan Islam Politik muncul sebagai gejala sosial politik di berbagai belahan dunia yang berkait dengan aktivitas sekelompok individu

Muslim yang melakukan gerakan dengan landasan ideologi yang diyakini bersama, yaitu tatanan Ilahi. Lihat Gilles Kepel, *Jihad: The Trail of Political Islam* (London: I.B. Tauris, 2002), h. 23.

¹³ Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Geneologi, dan Teori* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012), h. 11.

¹⁴ Asef Bayat, *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn* (Stanford University Press, 2007), diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerbit LKiS dengan judul: *Pos-Islamisme*, terj. Faiz Tajul Milah. (Yogyakarta: LKiS, 2012), h. X & 30.

Perjanjian Damai Israel-Mesir pada tahun 1979.¹⁵

Peristiwa kejadiannya dapat dipaparkan sebagai berikut:

“Pada saat dilaksanakan parade pesawat udara di hari nasional, 6 Oktober 1981, Anwar Sadat, gagah dalam seragam upacara, berdiri di tribun untuk menonton parade militer menandai ulang tahun ke-8 peluncuran perang Oktober 1973 melawan Israel (menyeberangi Terusan Suez dan menerobos Israel Bar-Lev Saluran Sinai). Peringatan ini selalu dirayakan dengan acara khusus dan penuh hikmat.¹⁶ Para anggota kelompok Islam yang disebut *al-Jihâd* yang dikepalai oleh Letnan Khaled Islambouli, anggota kelompok 'Abd al-Salam Faraj memilih tanggal simbolis tersebut untuk bertindak terhadap negara Mesir dengan cara yang paling spektakuler, yaitu dengan membunuh Presiden. Tiba-tiba, dalam tampilan penuh dari kamera televisi, sebuah truk tanah militer berhenti dan terlihat ada empat orang yang melepaskan tembakan. Mereka berdiri dengan senjata otomatis. Pada saat itulah Presiden Anwar Sadat tewas di tengah-tengah kepanikan yang tidak terlukiskan. Ketika saat *shock* dan kelumpuhan telah berlalu, semua masyarakat Mesir datang untuk mengetahui Letnan Khalid al-Islambouli, pemimpin kelompok pembunuh. Ia berteriak dan berkata bahwa ia telah menembak berulang-ulang dan telah ia lakukan di mana-mana: "Saya Khalid al-Islambouli, saya telah membunuh Firaun, dan saya tidak takut mati". Di mata opini publik Mesir, Khalid muncul sebagai

semacam “lengan kanan” dari kehendak rakyat, dan bukan hanya sebagai eksponen militan dari kelompok Islam.”¹⁷

Prestasi terbesar Islamisme Mesir adalah melatih dan mencetak guru-guru masa depan yang akan mengibarkan bendera Islamisme di ruang-ruang kelas mereka.¹⁸ Ini yang dipraktikkan dan terpraktikkan di Indonesia dengan berdirinya TK IT (Islam Terpadu), SD IT, SMP IT, SMA IT dan organisasi Pendidikan Islam, seperti ROHIS (Rohani Islam) yang menyebar di sekolah-sekolah SMA, hampir di seluruh Indonesia. Ini juga sebagai hipotesa untuk jawaban sebuah pertanyaan: “mengapa 60 % hasil survey bahwa pemuda di Jakarta, Tangerang dan Bekasi menginginkan Indonesia menjadi negara Islam, dan hasil survey tahun 2016 Habib Rizieq menjadi tokoh papan atas di Indonesia.”¹⁹

Islamisme merupakan gerakan masa, untuk sebuah perubahan sosial akibat ketidakpuasan dan kecewa terhadap rezim yang dianggapnya otoriter dan tidak peduli dengan kemiskinan rakyat. Ciri-cirinya, gerakan ini diikuti oleh masa yang cukup besar dan sulit untuk dilawan. Ini terjadi di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan dan terus berlanjut dan mulai mencapai puncaknya pasca-tumbanganya rezim otoriter Suharto pada bulan Mei 1998. Ada kesempatan politik yang sangat terbuka lebar pasca-Suharto yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok Islamisme yang sudah lama eksis di Indonesia.

Gerakan Islam yang mulai bangkit pasca lengsernya rezim Orde Baru ditandai oleh dua model gerakan; yaitu struktural dan kultural. Model

¹⁵

https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Perdamaian_Camp_David, diakses tanggal 13 September 2017.

¹⁶ Gilles Kepel, *Muslim Extremism...*, h. 35.

¹⁷ *Ibid.*, h. 191-192.

¹⁸ Asef Bayat, *Making Islam Democratic...*, h. 82

¹⁹ Wawancara dengan Dr. Iwu Dwisetyani Utomo, seorang Dosen dan Peneliti dari Australian National University (ANU Canberra-Australia, 2 April 2017.

gerakan *pertama* ditandai dengan maraknya pendirian partai-partai Islam, seperti PBB (Partai Bulan Bintang), PKS (Partai Keadilan Sosial), PKU (Partai Kebangkitan Umat), Partai Masyumi Baru, dan PP (Partai Persatuan). Model gerakan *kedua* ditandai dengan munculnya Ormas-Ormas Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad (LJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizb al-Tahrir Indonesia (HTI), dan menyusul gerakan lainnya yang sudah ada sejak zaman Orde Baru, seperti Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), dan Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI).

Gerakan-gerakan Islam tersebut di atas ada yang dengan sengaja berteriak menyerukan tatanan dunia totaliter dengan menggelar wacana dan aktivitas keagamaan yang bertujuan menyemai norma, simbol dan retorika penuh dengan kecurigaan, kebencian dan bahkan kekerasan. Sebagai buktinya telah terjadi pengeboman di mana-mana, seperti di Bali pada bulan Oktober 2002 dan 2005, di Hotel Marriot dan Kedutaan Australia di Jakarta pada 2004, Hotel Marriot dan Ritz-Carlton di Jakarta pada 2009, dan dekat Gereja Christ Cathedral, Serpong, pada 2010-2012.²⁰

Peristiwa teror tersebut di atas sungguh sangat merepotkan pemerintah Indonesia untuk mencari jalan keluar yang paling ampuh dan aman bagi masyarakat Indonesia maupun para turis yang datang ke Indonesia dan terutama dalam rangka menjaga hubungan baik dengan dunia internasional. Segala daya upaya dilakukan oleh pemerintah dan telah ditemukan solusinya di bawah bendera penegakan hukum (*law enforcement*), terutama melalui Densus 88.²¹ Peristiwa teror tersebut di atas terjadi di

Indonesia, menurut Noorhaidi Hasan, sebagai perwujudan sebuah kekecewaan (frustrasi) yang mendalam terhadap rezim yang menurut mereka “otoriter” dan lebih memilih bekerja sama dengan Barat.²² Sesuai dengan teori relasi-kuasa Foucault bahwa setiap ada sebuah kekuasaan akan melahirkan sebuah penolakan. Maka, munculnya kelompok-kelompok Islamisme jihadis di Indonesia itu pun sebagai jawaban atas kekecewaan dan mereka memiliki modal pemahaman politik Islam sebagai warisan dari para pendahulunya, baik dari Timur tengah, seperti *al-Ikhwān al-Muslimun* atau pun Masyumi di Indonesia.

Contoh nyata di Indonesia, yaitu adanya Gerakan 212 menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur Jakarta April 2017 lalu yang menolak pencalonan Ahok-Djarot sebagai calon Gubernur yang bertanding dengan Anies-Sandi. Realitasnya Ahok-Djarot kalah dan sekaligus mendapat putusan 2 tahun penjara atas tuntutan kelompok Islamisme yang dianggap telah menista agama Islam dan melecehkan Alquran.

Peristiwa pemilihan Presiden di Iran tahun 23 Mei 1997,²³ di mana seorang kandidat Presiden dari kelompok Pos-Islamisme, Muhammad Khatami, mengalahkan ulama yang telah mapan, Ayatollah Nateq Nuri, yang mendapatkan dukungan penuh dari seluruh bangunan konservatif, media yang dijalankan negara, militer, kebanyakan Imam salat Jumat, dan Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei. Penulis katakan bahwa peristiwa ini merupakan revolusi kedua Iran, yaitu: “Revolusi Pos-Islamisme”. Muhammad Khatami berkuasa atas janji “reformasi” pemerintahan Pos-Islamisme menuju negara yang demokrasi dan kebebasan sipil. Iran

²⁰ Noorhaidi Hasan, *Islam Politik . . .*, h. ix.

²¹ *Ibid*, h. ix.

²² *Ibid*, h. xii.

²³ Asef Bayat, *Making Islam Democratic . . .*, h. 197.

dijadikan model penerapan demokrasi di dunia Muslim sejak saat itu. Peristiwa ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Indonesia dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada bulan April 2017 yang lalu. Kandidat gubernur dan wakil Gubernur Anies-Sandi menang, karena mendapat dukungan penuh dari kelompok Islamisme di wilayah Jakarta dan bahkan dari seluruh Islamisme yang ada di Indonesia dari sabang sampai merauke.

Pemilu Presiden di Indonesia 2014 yang lalu, beda lagi. Di mana kandidat yang kalah terus mengajak kelompok Islamisme untuk terus eksis di ruang publik dengan cara menghasut masyarakat awam sejak 2014 sampai sekarang.²⁴ Sebagai contohnya, sekarang muncullah isu-isu PKI yang sebenarnya sudah tidak layak dimunculkan lagi dalam konteks Indonesia yang sekarang. Zamannya sudah beda dan banyak yang melek bahwa isu PKI itu hanya isu politik untuk menjatuhkan lawan dan mencari-cari kelemahan lawan. Maka muncullah isu PKI yang tidak jelas ujung pangkalnya.

Jadi, kemunculan kembali Islam dalam format Islamisme bukanlah kemunculan kembali iman, melainkan kemunculan “kembalinya yang-suci” dengan klaim politik. Menurut Bassam Tibi, gagasan “kembalinya yang-suci” ini bertumpu pada tiga anggapan jika diterapkan pada Islam, yaitu sebagai berikut:

“*Pertama*, agama Islam itu diperuntukkan bagi umat Islam awam dan bukan formula politik untuk suatu tatanan negara, tetapi merupakan sistem ibadah dan budaya yang menentukan pandangan dunia dan cara hidup mereka. Hal ini sudah begitu jelas bahwa formula Islamis ihwal *din wa-daulah* (kesatuan agama dan negara)

bukan merupakan ciri Islam itu sendiri tetapi penanda batas utama antara Islam dan Islamisme. Ini merupakan tradisi temuan, diciptakan untuk menanggapi globalisasi modernitas, yang dihasilkan oleh “krisis Islam modern” yang lazim terjadi di seluruh peradaban Islam. Tanpa krisis Republik Weimar di Jerman, tidak akan ada sosialisme nasional, dan tanpa krisis di dunia Islam, mungkin tidak akan ada Islamisme. *Kedua*, sebagai varian fundamentalisme agama, Islamisme bukan hanya bentuk lain dari modernitas, sebagaimana yang disebut oleh sebagian sarjana tentang perbedaan “modernitas lipat ganda”. Ini merupakan ideologi totaliter, dengan adanya gerakan tersebut yang mempresentasikannya. Penggunaan instrumental bentuk masyarakat sipil yang demokratis tidak mengubah gerakan totalitarian menjadi gerakan yang demokratis. *Ketiga*, Islamisasi demokrasi yang seharusnya dicapai dalam konteks syariah hanyalah kamufase bagi agenda tatanan yang totaliter. Konsep Islamis ihwal tatanan Ilahi tidak hanya menolak kedaulatan rakyat, tetapi juga menolak setiap pluralisme demokratis yang mengakui suatu tempat bagi politik lain. Islamis berpikir dalam kode biner ihwal mukmin sejati dan orang kafir. Islamisme secara intrinsik tidak sesuai dengan bentuk liberal “Islam yang terbuka”. Islamisme tidak memiliki semua dasar-dasar etika untuk merengkuh pluralisme demokratis.”²⁵

Masalah yang terkait dengan gagasan “kembalinya yang-suci”, Bassam Tibi berargumen bahwa krisis Islam modern diperburuk oleh kesulitan menghadapi modernitas dan juga oleh krisis pembangunan yang terkait dengan modernitas dunia Arab yang tidak gagal.

²⁴ Hasil pengamatan penulis melalui pemberitaan Media masa.

²⁵ Bassam Tibi, *Islam and Islamism . . .*, h. 50-51.

Mereka menjadikan taghrib (westernisasi) sebagai kambing hitamnya. Akhirnya mereka menyerah dan kecewa dengan berdalih kembalinya yang-suci (kembali ke syariah) untuk menjawab krisis modernitas.²⁶ Ini juga yang menjadi salah satu sebab munculnya gerakan Islamisme di samping faktor-faktor yang lain. Setiap ada sebuah kekuasaan akan melahirkan sebuah penolakan, dan Islamisme muncul sebagai wujud penolakan terhadap rezim yang dianggapnya gagal dan otoriter.

Selanjutnya perlu diperhatikan tiga perbedaan yang sangat mendasar dalam rangka mencari pemahaman terhadap Islamisme, yaitu sebagai berikut:

1. Agama politik dan problematika tatanan politik. Di mana Islamisme itu berasal dari politisasi agama. Jika agama yang dipolitisasi ini hanyalah indikasi dari adanya perbedaan budaya, bisa disediakan ruang dengan mengatasnamakan keanekaragaman. Tetapi, Islamisme, sebagai varian Islam atas fenomena global fundamentalisme agama, secara unik berfokus pada tatanan internasional. Kalangan Islamisme berupaya memobilisasi masa atas dasar agama dalam rangka menegakkan bukan hanya negara Islam, tetapi juga memperbaiki dunia. Negara syariah bukanlah varian Islam atas konstitusionalisme tetapi inti dari tatanan yang tertanam dalam upaya Islamisme demi mewujudkan *pax Islamica* global. Tujuan ini sama-sama dicanangkan oleh Islamisme, baik yang tanpa kekerasan maupun yang jihadis.

2. Islamisme terdiri atas Islamisme institusional (anti kekerasan) dan Islamisme jihadis (kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan). Namun antara keduanya memiliki ambisi yang sama, yaitu tatanan negara Islam. Islamisme ingin mengganti sistem rezim yang menurut mereka otoriter kepada sistem yang totaliter. Ini sama saja berpindah dari satu penyakit ke penyakit ke penyakit lain yang lebih kronis.

3. Politisasi agama merupakan fenomena global, di mana Islamisme adalah menjadi contoh pentingnya. Islamisme adalah politik yang diagamaisasikan.²⁷ Islamisme telah mengglobal, ada di dunia Islam, Eropa²⁸ maupun diaspora di Barat.

Tokoh-tokoh Islamisme di dunia Islam dapat dicontohkan, antara lain Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, 'Abd al-Qadir 'Audah, Yusuf al-Qaradhawi asal Mesir; Abu al-A'la al-Maududi asal India; dan Usamah bin Muhammad bin Awwad bin Ladin asal Riyadh, Arab Saudi, anggota dewan dari al-Qaeda. Sedangkan tokoh-tokoh Islamisme di Indonesia dapat digambarkan seperti, antara lain Kartosoewirjo, Kahar Muzakkar, dan Abdullah Sungkar adalah tokoh di Negara Islam Indonesia (NII); sedangkan Abu Bakar Ba'asyir khususnya, selain menjadi tokoh di Negara Islam Indonesia (NII), ia juga menjadi pendukung Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS); Dr. Habib Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab, L.c., M.A. sebagai tokoh Front Pembela Islam; dan Ismail Yusanto tokoh Hizb al-Tahrir Indonesia.

²⁶ *Ibid*, h.238

²⁷ *Ibid*, h. 305-307.

²⁸ Eropa adalah tuan rumah bagi diaspora Islam yang sangat berkembang dan Eropa bersebelahan dengan dunia Islam.

Eksistensi dan Perkembangan Islamisme di Indonesia

Perlu ada penegasan bahwa apa yang dipahami oleh Barat: "Islam adalah agama politik." Alasannya bahwa Islam memantapkan eksistensinya melalui penaklukan militer.²⁹ Pernyataan Barat yang demikian ini adalah wujud salah paham terhadap makna Islam yang sebenarnya, karena tidak memahami apa itu Islam dan apa itu Islamisme. Di mana Islam bukan agama politik, ada perbedaan antara Islam dan Islamisme. Islam adalah paham agama tauhid yang mengajak pada keimanan, sedangkan Islamisme adalah pemahaman agama (Islam) dalam bentuk tatanan sebuah negara, yaitu negara Islam. Mereka telah memanfaatkan agama untuk kepentingan politik.

Kelompok Islamisme mempunyai tujuan sosial, yaitu: membangun komunitas ideologis; mendirikan negara Islam dan menerapkan syariat Islam.³⁰ Tujuan ini berlaku sama bagi kelompok Islamisme, baik di Negara Arab maupun di Indonesia. Alasannya, bahwa seluruh dunia Islam mendapat pengaruh dari Sayyid Qutb,³¹ sang *rector spiritus* Islam politik yang pertama kali menafsirkan jihad sebagai "revolusi dunia Islam" dalam mengupayakan tegaknya tatanan dunia Islam di seluruh dunia sebagai tantangan terhadap sekularisme.³² Qutb adalah ide utama tentang adanya tatanan Ilahi (pemerintah Allah) dalam bukunya "*Ma'alim fi al'Thariq*". Menurutnya, ini adalah kewajiban agama (Islam) untuk mengejar jihad sebagai "revolusi dunia Islam" dalam rangka mengatasi kebodohan pra-Islam yang identik dengan kafir. Faham inilah yang terus disebarkan ke seluruh telinga umat Islam sedunia. Inilah jawaban dari pertanyaan: "mengapa banyak orang terpengaruh untuk

mendukung tegaknya negara Islam termasuk di Indonesia, sejak zaman pra-kemerdekaan sampai sekarang." Pengaruh Qutbisme sangat kuat sekali bahkan sampai ke Indonesia, yaitu Islamisme yang memahami Islam sebagai tatanan negara.

Qutb untuk Islamisme sebanding dengan Marx untuk Marxisme. Alasannya bahwa Qutb adalah penggerak utama Islam politik (Islamisme), di mana ide-ide utamanya begitu cepat menyebar ke seluruh dunia dan sampai ke Indonesia. Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi adalah warisan Qutb. Ia menulis dalam bukunya "*al-Hall al-Islami wa al-Hulul al-Mustauradah* (solusi Islam dan solusi yang diimpor). Karyanya sebagai wujud atas penolakan terhadap nilai-nilai Barat untuk menggantikan nilai-nilai yang Islami. Menurutnya bahwa demokrasi solusi yang diimpor, Islam menghadirkan syariah sebagai solusi impor (demokrasi).³³

Ide-ide tokoh pendahulu Islamisme tersebut di atas telah dijadikan dasar penolakan demokrasi oleh penggiat dan pengikut Islamisme sejak dahulu sampai sekarang termasuk di Indonesia. Islamisme di Indonesia tidak ada begitu saja tanpa dipengaruhi oleh para penggiat Islamisme dari Timur tengah, terutama Mesir, yaitu gerakan merayap dari *al-Ikhwan al-Muslimun*.

Kelompok-kelompok Islamisme di Indonesia

Ledakan Islamisme di arena politik Indonesia pasca-Soeharto mendapat perhatian banyak pengamat dalam maupun luar negeri. Alasannya, hal itu terjadi di Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia yang secara umum diasosiasikan dengan varian Islam yang damai dan toleran.³⁴ Di mana Islam di Indonesia bisa berdialog dengan budaya

²⁹ Noorhaidi Hasan, *Islam Politik . . .*, h. 16

³⁰ Asef Bayat, *Pos-Islamisme*, h. 15

³¹ Sayyid Qutb dieksekusi pada tahun 1966 atas tuduhan merencanakan pembunuhan para pejabat Mesir termasuk Presiden Nasser.

³² Bassam Tibi, *Islamism and Islam . . .*, h. 54.

³³ *Ibid*, h. 125-126

³⁴ Noorhaidi Hasan, *Islam Politik . . .*, h. 170.

lokal yang juga plural. Islam tidak menolak budaya yang ada bahkan bisa tetap beradaptasi dengan budaya yang ada. Itulah yang dinamakan dengan istilah Islam keindonesiaan atau pun Islam Nusantara.

Apakah Islamisme mau menerima apa yang dimaksud dengan Islam keindonesiaan atau pun Islam Nusantara dimaksud. Menurut pengamatan penulis, tidak. Alasannya, Islamisme masih berpaham bahwa Islam itu identik Arab, baik dalam hal cara berpakaian, adat istiadat, pola hidup, pola berekonomi, dan pendidikan. Sebagai buktinya mereka lebih nyaman menggunakan cadar bagi yang perempuan, memelihara jenggot dan celana cingkrang bagi yang laki-laki, memilih jalan berdagang dalam hal pengembangan ekonomi, dan mendirikan sekolah-sekolah model Islam terpadu dan Dakwah Salafi.

Inilah kelompok-kelompok Islamisme yang bermunculan di Indonesia Pasca-Soeharto, pada 21 Mei 1998, antara lain, sebagai berikut:

- a. Laskar Pembela Islam
- b. Laskar Jihad
- c. Laskar Mujahidin Indonesia
- d. KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), bagian dari perluasan penyebaran pengaruh *al-Ikhwan al-Muslimun* di Indonesia, yang awalnya berkembang di kampus-kampus universitas dalam payung gerakan tarbiyah.
- e. HTI (Hizb al-Tahrir Indonesia), tumbuh sebagai bagian dari gerakan transnasional Hizb al-Tahrir yang berpusat di Timur Tengah.
- f. Barisan Pemuda Ka'bah
- g. Gerakan Pemuda Islam (GPI)
- h. Front Hizbullah Bulan Bintang
- i. Front Pembela Islam (FPI), didirikan pada tanggal 17 Agustus

1998 oleh Muhammad Rizieq Syihab (1965). Kebanyakan anggotanya berasal dari ikatan-ikatan pemuda masjid dari penjurur Jakarta dan sejumlah madrasah atau pun pesantren di sekitar Jakarta. Latar belakang mereka umumnya para pemuda pengangguran, termasuk kelompok-kelompok preman. Moto yang diajarkan "hiduplah dengan mulia atau lebih baik mati sebagai syahid". Dalam tempo singkat, FPI berhasil memperluas jaringannya ke kota-kota di luar Jakarta. Pada tahun 2004 telah mendirikan 18 cabang di tingkat provinsi dan sebanyak 50 perwakilan cabang di tingkat kabupaten dengan puluhan ribu simpatisan di seluruh Indonesia.

Akhir-akhir ini terjadi pembubaran salah satu dari kelompok-kelompok Islamisme tersebut di atas, yaitu kelompok yang menamakan dirinya sebagai kelompok Hizb al-Tahrir Indonesia. Terjadi pro dan kontra atas tindakan pemerintah atas pembubaran HTI di Indonesia yang resmi dibubarkan pada tanggal 24 Oktober 2017.³⁵ Alasannya bahwa HTI telah menolak Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan sebagai alternatifnya adalah negara Khilafah.

Noorhaidi Hasan menolak tindakan pemerintah yang membubarkan Hizb al-Tahrir, demikian komentarnya:

"Saya tidak pernah suka apalagi mendukung ide revitalisasi khilafah yang didengungkan HTI. Bagi saya, itu mimpi utopis para pecundang modernitas global yang frustrasi dengan masa depan. Tapi biarkanlah ide itu rontok berhadapan dengan nalar publik yang berkembang di ruang demokrasi, yang mestinya tidak lagi tertarik dengan segala model

kekuasaan teokratis yang membelenggu. Faktanya, mayoritas masyarakat Indonesia percaya NKRI dan Pancasila merupakan harga mati. Saya khawatir, jika dihadapi dengan cara yang tidak demokratis, Ide-ide HTI justru akan semakin *justified* dan beresonansi di kalangan masyarakat Indonesia yang sedang didera mentalitas kecemasan (*siege mentality*) dan kepercayaan yang terlalu tinggi terhadap hal-hal yang berbau konspiratif.”³⁶

Statemen tersebut di atas merupakan kritik terhadap pemerintah yang tidak menerapkan sistem dialog dalam menghadapi kelompok-kelompok yang menjadi oposisinya. Menurut pengalaman penulis, kekerasan tetap tidak bisa dihadapi dengan kekerasan. Sebaliknya mesti dihadapi dengan cara dialog yang ramah untuk dicari solusi jalan tengahnya, dan ini yang belum dipraktikkan pemerintah selama ini.

Selanjutnya Prof. Noorhaidi menambah komentarnya bahwa pembubaran Hizb al-Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah RI adalah “blunder besar”. Alasannya bahwa akar intoleransi di Indonesia yang menjadi masalah utama negeri ini bukan khilafah, tapi mentalitas kecemasan dan keyakinan pada konspirasi yang terwujud dalam nyala api demonstrasi 411, 212 di Jakarta 2016-2017 dampak dari Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta (Ahok-Djarot dan Anies-Sandi).

Anak muda teriak khilafah itu seperti hanya mau minta “tolong dong, perhatikan kami”. Masa depan kami tidak begitu jelas, nih. Jadi, menurut Prof. Noorhaidi Hasan, HTI di Indonesia, tidak melakukan langkah-langkah sistematis untuk meruntuhkan

kekuasaan. Mereka hanya sedang berusaha “merintis jalan” mobilitas ke atas yang diharapkan semua muda. Digertak pakai penegakan hukum saja beres.³⁷

Model pernyataan HTI tersebut di atas—“tolong dong, perhatikan kami”— yang dimaksud oleh Prof. Noorhaidi di atas, perlu dipahami melalui teori “CDA (*Critical Discourse Analysis*)”³⁸ yaitu bahwa sebuah makna perlu dipahami lewat apa yang tersembunyi di balik maknanya. Dalam bahasa awam sering diistilahkan dengan “ada udang di balik batu”, maksudnya ada maksud tersembunyi di balik sebuah tindakan seseorang terhadap orang lain. Masalahnya, hanya orang-orang tertentu saja yang sanggup memahami teori ini. Perlu ada seorang pemimpin dan juga pakar ilmu pengetahuan di Indonesia ini, atau paling tidak bahwa pemimpin itu perlu punya penasihat kenegaraan yang terdiri atas beberapa orang pakar yang ahli dalam bidangnya. Jadi, tidak hanya bagi-bagi kursi secara merata tanpa melihat latar belakang kepakarannya.

Makna Demokrasi bagi Islamisme di Indonesia

Hakikat Islamisme adalah kelompok yang menolak demokrasi, seperti dalam hal adanya praktik Pemilu. Alasannya bahwa Pemilu dipandang sebagai kegiatan yang mendewakan kehendak mayoritas (rakyat) daripada kehendak Tuhan. Mereka berpendapat bahwa Pemilu itu adalah serupa dengan syirik, yaitu lebih percaya dan tunduk dengan kehendak manusia daripada Tuhan. Namun lain halnya di Indonesia, Islamisme ikut dalam Pemilu, dengan pertimbangan bahwa Pemilu adalah cara sah merebut

³⁶ Status Prof. Noorhaidi Hasan di FB, 9 Mei pukul 08.57 am, 2017.

³⁷ Hasil *research* Prof. Noorhaidi Hasan dan koleganya di 20 Provinsi di Indonesia pada tahun 2013. Dimuat dalam Tempo. Co, ed. Kurniawan,

Senin, 8 Mei 2017 21.11 pm. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2017.

³⁸ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LkiS. 2011), h. 18

kendali kekuasaan dan sebagai cara memperjuangkan penerapan syariat Islam.³⁹ Ini terbukti, di mana Anies-Sandi sebagai gubernur Jakarta terpilih untuk periode 2017-2022 atas dukungan Islamisme, mau tidak mau mesti lebih terlihat syar'i dalam praktik kepemimpinannya dari gubernur sebelumnya. Misalnya tentang apa yang yang dipraktikkan oleh gubernur dan wakil gubernur Jakarta di awal pemerintahannya saat ini. Mereka telah wewujudkan apa yang pernah dijanjikan dalam kampanye dulu di hadapan Islamisme sebagai pendukungnya, antara lain: memperdengarkan suara azan di Balai Kota yang berhasil disambungkan dari masjid Fatahilah; dan mereka telah berhasil menutup Hotel Alexis dengan cara tidak memperpanjang izin usahanya sejak 27 Oktober 2017. Alasannya, Alexis menyediakan hiburan khusus untuk kaum dewasa untuk praktik-praktik prostitusi.⁴⁰ Tindakan yang dilakukan oleh gubernur dan wakilnya (Anies-Sandi), bila dibaca dengan menggunakan teori CDA (*Critical Discourse Analysis*) bermakna bahwa mereka telah memanfaatkan syariat Islam dalam rangka melegitimasi kekuasaannya. Ini dilakukan oleh mereka dalam rangka menolak sistem pemerintahan sebelumnya (Ahok-Djarot) yang ditolak oleh kelompok Islamisme yang dianggap tidak menerapkan syariat Islam.

Konteks Indonesia saat ini, di bawah pimpinan Presiden Jokowi, demokrasi sudah terpraktikkan walau pun masih dalam tahapan proses. Eksistensi kelompok Islamisme dalam pengamatan penulis juga ikut dan mengikuti sistem demokrasi yang ada, meskipun masih sebatas "dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh politik" dalam rangka memperoleh sebuah kursi kekuasaan.

Namun demikian, antara para tokoh politik dan kelompok Islamisme bagaikan dua sisi yang saling membutuhkan dan saling ingin berkuasa dan menguasai ruang publik dalam rangka menambah masa untuk kelompoknya. Ini adalah sebuah kesempatan emas untuk bisa menguasai ruang publik dan untuk bisa lebih mengeksiskan diri di ruang publik.

Sekarang adalah slogan "PDIP tidak takut kehilangan umat Islam. Ayo Muslim saudaraku!!! Kita buktikan, kita tidak butuh PDIP".⁴¹ Profil yang membuat status ini menggunakan foto Prabowo. Ini adalah bahasa politik yang diciptakan untuk memberi dan mencari dukungan untuk tokoh politik dan dalam rangka menjatuhkan tokoh politik tertentu. Pelaku sudah jelas berasal dari kelompok Islamisme yang dirinya tidak sadar bahwa ia sedang dimanfaatkan oleh seorang tokoh politik untuk mendukung dirinya dan menjatuhkan lawannya dengan alasan demi Islam dan demi umat Islam Indonesia.

Sampel tindakan di atas bisa dijadikan gambaran bahwa eksistensi Islamisme di Indonesia pada saat ini baru sebatas "dimanfaatkan" tapi mereka tidak sadar dan bahkan tidak tahu bahwa mereka dimanfaatkan dengan membawa bendera Islam. Sebaliknya mereka bangga bahwa mereka adalah pejuang Islam untuk umat Islam di Indonesia yang sesungguhnya. Ini merupakan tindakan yang cukup memprihatinkan, tapi kebanyakan dari mereka tidak sadar dan belum tahu.

Peristiwa Pilgub Jakarta yang terjadi bulan April lalu yang dimenangkan oleh Anies-Sandi, jelas-jelas mendapat dukungan besar dari kelompok Islamisme yang ada di sekitar wilayah Jakarta. Isu Jakarta bersyariat

³⁹Noorhaisi Hasan, *Islam Politik* . . . , h. 90

⁴⁰Tempo. Co, 30 Oktober 2017. Diakses pada tanggal 1 Nopember 2017

⁴¹ Status an. Yunisman Mzaini di FB, 30 Oktober 2017.

pun sempat terdengar di telinga penulis. Peristiwa ini telah mengingatkan penulis atas tragedi meninggalnya Gamal Abdul Nasser, Presiden Mesir, pada tahun 1970 dan digantikan oleh Anwar Sadat. Sadat terpilih sebagai Presiden Mesir juga atas dukungan kelompok Islamisme atas janji-janji kampanye Sadat yang membuat kelompok Islamisme tersanjung dan sempat naik daun pada waktu itu. Sadat berjanji akan menerapkan syariat Islam di Mesir seperti apa yang diinginkan oleh kelompok Islamisme pada waktu itu. Realitasnya, Sadat dianggap ingkar janji dan mati tertembak sebagai aksi balas dendam kelompok Islamisme Jihadis yang merasa kecewa akan janji-janji Sadat yang tidak kunjung dipenuhi.

Dari gambaran kemenangan Anies-Sandi atas dukungan Islamisme se-Indonesia menunjukkan suatu bukti bahwa umat Muslim kalangan Islamisme di Indonesia sudah terdoktrin bahwa Islam memiliki teori politik dan negara, segalanya ada dalam syariah yang bersumber dari Alquran. Pola ini penulis dapatkan dari pembacaan di FB tentang adanya debat kusir sekitar politik di Indonesia dan hubungannya dengan Islam. Di mana ada yang menolak dengan ide pemisahan antara politik negara dan Islam. Menurut mereka tidak mungkin dipisahkan, karena semua aturan sudah lengkap diatur dalam syariat Islam, mulai dari masalah taharah sampai masalah urusan pemerintahan dan negara.⁴² Selain itu, Islamisme memiliki paham bahwa seorang pemimpin adalah pemimpin politik sekaligus pemimpin keagamaan umat Islam.

Dasar paham Islamisme adalah bahwa "agama mayoritas bangsa Indonesia adalah Islam" yang mesti dipimpin oleh pemimpin yang beragama

Islam. Gus Dur pernah memberikan kritik untuk masalah ini. Menurut Gus Dur, realitas penganut agama Islam di Indonesia masih berada pada tahap Islam identitas dan penganut Islam yang benar-benar taat menjalankan rutinitas ibadahnya belum sebanding dengan yang masih abangan. Hal ini yang tidak sepadan dengan ambisi Islamisme untuk menegakkan negara Islam yang berdasar syariat Islam secara total di Indonesia.

Istilah "taghut" sering disuarakan oleh Islamisme untuk menyebut pemerintahan Jokowi saat ini. Apa yang mereka maksudkan dengan istilah "taghut" adalah sebuah cibiran yang dilontarkan kepada rezim yang dianggap tidak taat pada syariat Islam (hukum Ilahi).⁴³ Apa yang ada di balik ungkapan "taghut" dimaksud adalah bahwa Presiden Jokowi terlibat atas pencalonan Ahok sebagai calon gubernur Jakarta. Islamisme berpaham bahwa yang berhak dicalonkan sebagai gubernur Jakarta adalah orang yang beragama Islam.

Menurut pengamatan penulis, apa yang ada di balik itu semua, ada kelompok yang dimanfaatkan oleh tokoh politik dalam rangka menambah suara dalam rangka menjatuhkan lawan politiknya. Seperti munculnya isu-isu "PKI" di permukaan secara tiba-tiba. Ini adalah politik kotor yang dimainkan oleh tokoh politik di Indonesia untuk menghasut rakyat dan kelompok Islamisme dengan niat untuk meruntuhkan kepercayaan rakyat pada pemerintahan Jokowi.

Jadi Islamisme dalam konteks Indonesia sekarang sedang dimanfaatkan oleh tokoh politik Indonesia dalam rangka menduduki sebuah kekuasaan dan menyingkirkan kekuatan lawan untuk hengkang dari

⁴² Debat kusir di FB seputar perpolitikan di Indonesia 2017, terkait dengan Ahok sebagai calon Gubernur Jakarta.

⁴³ Noorhaidi, *Islam Politik . . .*, h. 88

sebuah kekuasaan. Ironisnya, Islamisme sangat bangga dengan kesempatan ini, meskipun dimanfaatkan mereka sebagian tidak tahu dan sebagian tahu yang penting bisa tetap eksis di ruang publik dan bisa menambah pengikut untuk kelompoknya.

Di negara-negara di mana Muslim menjadi minoritas, seperti di Amerika dan Perancis, Muslim menyukai adanya praktik sekularisasi. Alasannya, mereka bebas mempraktikkan agamanya, jika agama Kristen atau Katolik menjadi agama negara, umat Islam akan terdiskriminasi. Sementara di negara di mana Muslim menjadi mayoritas seperti Indonesia, Islamisme justru menolak sekularisasi.⁴⁴

Kesimpulan

Hasil pemaparan dan analisa data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Islamisme merupakan produk dari perpolitikan di negara Timur Tengah. Lahirnya gerakan *al-Ikhwan al-Muslimun* yang didirikan oleh seorang tokoh Islamisme utama dan pertama di dunia Islam, yaitu Hasan al-Banna di Mesir pada tahun 1928 telah menjadi dasar gerakan Islamisme yang terus berkembang sampai sekarang. Paham Islamisme ini disebarkan dengan gerakan “merayap” sampai ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi, Islamisme adalah gerakan Islam tertua dan yang pertama ada di Indonesia dari pengaruh Mesir, sejak sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang.

44

http://www.academia.edu/3709160/Islamisme_dan_Post-Islamisme, diakses tanggal 4 Nopember 2017

⁴⁵ Gerakan 212 atau demonstrasi 2 Desember 2016 adalah kelompok yang menuntut mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dipenjara karena kasus penistaan agama (Surat al-Maidah). Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif, Wakil Ketua Presidium Alumni 212 Hasri Harahab dan Buni Yani, Pakar Ekonomi

Islamisme adalah sebutan untuk sebuah grup Muslim yang memahami bahwa Islam selain sebagai agama juga sebagai tatanan sebuah negara. Mereka memahami bahwa syariat Islam bisa dijadikan alternatif terhadap solusi impor, seperti demokrasi. Demikian juga bisa dijadikan solusi atas semua kejahatan politik yang telah mengakibatkan adanya krisis ekonomi, mental dan akhlak yang disebabkan oleh ulah rezim yang diktator, manipulatif dan korup.

Eksistensi Islamisme di Indonesia berdasarkan pembacaan terhadap realitas Indonesia zaman sekarang terkait dengan eksistensi Islamisme yang telah terwadahi dalam ormas-ormas Islam seperti, antara lain Masyumi, Front Pembela Islam (FPI), Hizb al-Partai Keadilan Sosial (PKS), Laskar Jihad (LJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Tahrir Indonesia (HTI), Negara Islam Indonesia (NII), Gerakan 411 (4 Nopember 2016) dan Gerakan 212 (2 Desember 2016).⁴⁵ Di mana eksistensi Islamisme lebih cenderung dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh politik Indonesia untuk menuju sebuah kekuasaan. Sebagai sampelnya adalah apa yang terjadi di sekitar Pemilu Gubernur Jakarta sejak 2016 sampai terpilihnya Anies-Sandi sebagai Gubernur Jakarta pada bulan April 2017 yang lalu.

Kontribusi penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada para pembaca khususnya dan pengembang ilmu pengetahuan pada

Syariah Didin Hafidhudin. Mereka, Pada hari ini, 2 Desember 2017 sedang mengikuti pelaksanaan Kongres Nasional Alumni 212 di Wisma Persaudaraan Haji Indonesia (PHI), Jakarta. Agendanya untuk menghasilkan “Maklumat Jakarta” yang akan dijadikan arah pergerakan Presidium Alumni 212 ke depan. Pada hari ini juga, 2 Desember 2017 sedang diadakan Reuni Akbar 212 di Monas Jakarta. <https://m.cnnindonesia.com>. Diakses pada tanggal 2 desember 2017.

umumnya terkait dengan istilah trend Islamisme yang selalu menjadi perbincangan hangat di belahan dunia global. Islam itu sangat berbeda dengan Islamisme, Islam bukan agama politik, Islamisme memanfaatkan Islam untuk kepentingan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abaza, M. *Changing Images of Three Generation of Azharites in Indonesia*. Singapore: Institut of Southeast Asia Studies Heng Mui Keng Terrace Pasir Panjang, 1993.
- Bayat, A. *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn (Stanford University Press, 2007)*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: *Pos-Islamisme*, terj. Faiz Tajul Milah. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Bertens, K. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Bertens, K. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. . Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001.
- Eriyanto. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. . Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Foucault, M. *The Will to Truth*, terj. Alan Sheridan. . London and New York: Tavistock Publications, 1980.
- Foucault, M. *Order of Thing an Archaeology of the Human Sciences*, terj. B. Priambodo & Pradana Boy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Foucault, M. *Aesthetic, Method, and Epistemology: Essential Works of Foucault 1954-1984*. Terj. Arief. . Yogyakarta: Jalasutra, 2011.
- Hasan, N. *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Geneologi, dan Teori*. . Yogyakarta: SUKA-Press, 2012.
- Hooker, M. B. Southeast Asian Shari'ahs . *Studia Islamika*, 20 No. 2, 236, 2013.
- Hooker, V. *Developing Islamic Arguments for Change Through "Liberal Islam"*, Dalam *Islam Perspectives on the New Millennium*. Singapore: Institute of Southenest Asian Studies, 2004.
- J., B. I. *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab Islam*, terj. Imam Khoiri. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Karim, K. A. *Syari'ah: Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, terj. Kamran As'ad, Judul Asli: *al-Judzûr at-T ārîkhiyyah li asy-Syarî'ah al-Islāmiyyah*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Kepel, G.. *Muslim Extremism in Egypt: the Prophet and Pharaoh*. . London: University of California Press, 1993.
- M. Aunu Abied Shah, M. A.. Khalil Abdul Karim: "Kiai Merah" dari Mesir (Metode Ilmiah dan Aplikasinya dalam Historiografi Islam). *Taswirul Afkar: Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan & Kebudayaan*, Edisi No. 15, 2003.
- Mahmudah, S. *Historisitas Syariah: Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim*. Yogyakarta: LKiS, . 2016.

Mahmudah, S. Reformasi Syariat Islam (Kritik Pemikiran Khalil Abdul Karim). *Al-Adalah*, 13 No. 1, 2016.

Minhaji, A. *Kontribusi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schacht*. . Yogyakarta: UII Press, 2001.

Tibi, B. *Islamism and Islam (Yale University Press)*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: *Islam dan Islamisme*. . Bandung: Mizan, 2016.